

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

KEK LIONG

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BPKP

kekliiong@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the extent of the application of principle Good Corporate Governance at PT Bank Central Asia Tbk. Besides aiming to determine the application of the principles of good corporate governance has applied to PT Bank Central Asia Tbk, this study also aims to analyze the constraints faced in the implementation of good corporate governance at PT Bank Central Asia Tbk. The results showed that the general application of the principles of good corporate governance which include transparency, independence, accountability, accountability and fairness in PT Bank Central Asia Tbk performed reasonably well although there still are obstacles faced. The constraints faced by PT Bank Central Asia Tbk is a constraint tightening bank credit, bank products are not yet Productivity fully efficient and effective, high standard of human resources as a result of globalization and the problem of internal fraud cases (internal fraud).

Keywords: *Good Corporate Governance, BCA, Openness, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Good Corporate Governance di PT Bank Central Asia Tbk. Selain bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan pada PT Bank Central Asia Tbk, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di PT Bank Central Asia Tbk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan umum prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, independensi, akuntabilitas, akuntabilitas dan kewajaran di PT Bank Central Asia Tbk dilakukan cukup baik meskipun masih ada kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi PT Bank Central Asia Tbk adalah kendala pengetatan kredit perbankan, produk bank belum Produktivitas

sepenuhnya efisien dan efektif, standar sumber daya manusia yang tinggi sebagai akibat dari globalisasi dan masalah kasus penipuan internal (penipuan internal).

Kata Kunci: *Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA, Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian, Keadilan.*

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar tahun 1997-1998, di mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagisemua kalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan).

Hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Perhatian terhadap corporate governance terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards (Kaihatu, 2006).

Dalam upaya mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah melalui penguatan sektor perbankan, Bank Indonesia pada tahun 2004 telah meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki visi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni:

- a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada Standar Internasional.
- c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
- d. Menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
- f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

MASALAH PENELITIAN

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *good corporate governance* pada PT Bank Central Asia Tbk.
2. Kendala-kendala apakah yang dialami PT Bank Central Asia Tbk. dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*

Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimanakah penerapan prinsip *good corporate governance* pada PT Bank Central AsiaTbk.
2. Untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *good corporate governance* pada PT Bank Central AsiaTbk.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan kepada PT Bank Central Asia Tbk dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan terkait dengan *good corporate governance*.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi PT Bank Central AsiaTbk dalam penyusunan rencana, strategi, dan kebijakan yang lebih efisien dan efektif pada masa datang.

Keterbatasan Penelitian

Untuk memudahkan proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian, keterbatasan tersebut antara lain adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Central Asia Tbk
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2013-2014
3. Faktor dan keadaan yang tidak menjadi cakupan: Politik, Sosial dan Budaya.

KAJIAN TEORI

Mekanisme Good Corporate Governance

Pilar-pilar yang melandasi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh

Organization for Economic Corporation and Development (OECD)

Adalah sebagai berikut ini:

a. Transparansi (*Transparency*)

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

b. Kewajaran (*Fairness*)

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (bylaws).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

e. Independensi (*Independency*)

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Aldridge dan Sutojo (2005) dalam Susanti (2010), penerapan Good Corporate Governance yang baik mempunyai lima manfaat, antara lain adalah :

- a. Mampu meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- b. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja manajemen level atas dan dewan komisaris.
- c. Mampu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.
- d. Mampu melindungi hak dan kepentingan para anggota yang berkepentingan selain para pemegang saham.
- e. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemegang saham, dewan

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena

tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sekaran (2006:46), "Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini." Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (1999:26) studi kasus adalah "Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan."

Tujuan dari studi kasus menurut Indriantoro dan Supomo (1999:26) adalah "Melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu. Lingkup penelitian kemungkinan berkaitan dengan siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu dan kejadian secara keseluruhan." Oleh karena itu, peneliti memilih studi kasus (case study) sebagai cara peneliti memahami subyek penelitian.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan Laporan Tahunan (Annual Report) perusahaan PT Bank Central Asia Tbk sebagai objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, dari rujukan teoritis yang relevan dengan membaca beberapa buku, majalah, buletin, surat kabar serta internet. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari website PT Bank Central Asia Tbk, terutama untuk data laporan tahunan atau annual report perusahaan pada tahun 2013. Selain itu, uraian artikel, jurnal, dokumen mengenai penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Central Asia Tbk.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka atau Literatur (Library Research)

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

b. Content Analysis

Merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (antara lain berupa: iklan, laporan, kontrak kerja, jurnal, majalah, atau surat kabar. Tujuan content analysis adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis. (Bambang, 1999)

Penentuan sampel dipilih secara purposive-sampling, yaitu dengan menentukan 1 (satu) perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan yakni PT Bank Central Asia Tbk dengan pertimbangan

bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan besar yang keberadaannya bisa berdampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2005) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data akan diolah dan dianalisis dengan deskriptif yaitu mengetahui bagaimanakah pelaksanaan good corporate governance dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa data yaitu:

1. Aspek *governance structure*.
2. Aspek *governance process*.
3. Aspek *governance outcome*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Setiap hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan tertib dan baik.
- 2) Setiap hasil rapat Dewan Komisaris diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan informasi yang relevan diteruskan kepada pihak yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
- 3) Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan BCA pada tanggal 6 Mei 2013.
- 2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya telah diterima/disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS Tahunan tanggal 6 Mei 2013.
- 3) Kebijakan-kebijakan BCA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah diungkapkan dalam:
 - Media "MyBCA" yang dapat diakses oleh karyawan BCA; dan
 - Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibagikan kepada seluruh karyawan BCA.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- 1) Hasil rapat Komite selalu dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara tertib dan baik.
- 2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris, hasil rapat seluruh

Komite merupakan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pengambilan keputusan.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

- 1) Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA.
- 2) Kegiatan operasional BCA bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA.
- 3) Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- 1) BCA telah menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali secara tepat waktu.
- 2) Cakupan laporan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pokokpokok laporan mencakup mengenai:
 - a) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
 - Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Bank Indonesia;
 - Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).
 - b) Pengelolaan Risiko Kepatuhan.
- 3) Tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- 1) Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern BCA dimuat dalam Laporan Tahunan BCA – bagian “Tata Kelola Perusahaan”, yang tersedia dalam RUPS.
- 2) DAI mengevaluasi dan melaporkan kepada Direksi hasil tindak lanjut auditee atas temuan pemeriksaan setiap tiga bulan sekali.
- 3) Assessment yang dilaksanakan telah obyektif.

SIMPULAN

Penerapan GCG pada PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, secara umum penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT Bank Central Asia Tbk dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi.

Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan penerapan prinsipprinsip good corporate governance adalah:

- A. Mengantisipasi kebijakan baru oleh Pemerintah dan Bank Indonesia di tahun 2013 dalam mengantisipasi perekonomian global yang sedang turun.

- B. Menaruh perhatian yang besar pada pengembangan pangsa pasar, dengan terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta stakeholder lainnya. Dengan demikian, BCA berada di jalur yang tepat untuk menjadi bank pilihan nasabah.
- C. Program-program pelatihan SDM yang efektif dan kompeten perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan, sehingga diharapkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas insan BCA dapat terus ditingkatkan.
- D. Program-program corporate social responsibility lebih tingkatkan lagi untuk lebih mendekatkan BCA dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. (2001). *Good Corporate Governance Sebagai Syarat Perusahaan Publik Untuk Mendapatkan Investasi*. Lintasan Ekonomi volume XVIII Nomor 2. Juli 2001.
- Baird, M. (2000). *The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries*, Paper.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Dua, Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Ahmad. (2003). *Disclosure Dan Corporate Governance: Suatu Tinjauan Teoritis*. TEMA Volume IV Nomor 1. Maret 2003.
- Indrayani, Mei dan Nurkholis. (2001). *Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*. TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi). Vol. II: 136 – 156.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Kaihatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 8 Nomor 1. Maret 2006: 1-9.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Enam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Krisna Wijaya. (2002). *Reformasi Perbankan Nasional*. Jakarta:
- Moleong, Lexi J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (1999). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publications Service. France: 9-19.
- "Pedoman Umum Good Corporate Governance". 2006. (<http://www.fcgi.or.id>), diakses 17 Juli 2013)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006* sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods For Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat
- Sukrisno, Agoes. (2004). *Good Corporate governance Practice in Indonesia and Malaysia*. Usahawan NO. 10 TH XXXIII. Oktober 2004.